

# FROM FORCED CULTIVATION TO INDUSTRIALISATION: SOCIO ECONOMIC IMPACTS AND THE EMERGENCE OF THE KALIBAGOR SUGAR FACTORY

Dari Tanam Paksa Ke Industrialisasi: Dampak Sosial Ekonomi Dan Kemunculan Pabrik Gula Kalibagor

Faizal Jefri Pratama<sup>1a</sup>, Arifin Suryo Nugroho<sup>2b</sup>

<sup>12</sup>Universitas muhammadiyah Purwokerto

<sup>a</sup>faizaljefri17@gmail.com

<sup>b</sup>arifinsuryonugroho@gmail.com

(\*) Corresponding Author  
faizaljefri17@gmail.com<sup>a</sup>

**How to Cite:** Faizal Jefri Pratama. (2026). Title of article. From Forced Cultivation To Industrialisation: Socio Economic Impacts And The Emergence Of The Kalibagor Sugar Factory  
doi: 10.36526/js.v3i2.6500

Received : 03-11-2025  
Revised : 12-12-2025  
Accepted : 13-03-2026

## Keywords:

Kalibagor Sugar Factory,  
Cultuurstelsel,  
Socioeconomic

## Abstract

This study examines the forced cultivation system or *cultuurstelsel* in Banyumas until the era of industrialisation, focusing on the socioeconomic impact of the Kalibagor Sugar Factory. This study employs historical methods, including the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, utilizing primary sources such as colonial archives and supported by secondary sources. The findings of this study indicate that *Cultuurstelsel* in Banyumas was an adaptation of the land tax policy, which aimed to produce export commodities and increase colonial revenue. Established in 1839, the Kalibagor Sugar Factory functioned as the main hub for the implementation of this system through the processing of sugar cane from surrounding village lands. Entering the era of industrialisation, the use of steam engines brought major changes to the socio economic order, as the wage labour system replaced the traditional agrarian pattern. This research concludes that the Kalibagor Sugar Factory transformed the pattern of Banyumas society from agrarian to industrial, as well as creating economic dependence by giving rise to a capitalist system and social inequality between the local elite and workers.

## PENDAHULUAN

Kebijakan *cultuurstelsel* atau tanam paksa yang diberlakukan pada abad ke-19 menjadi salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk memperbaiki kondisi ekonomi setelah kemunduran perusahaan dagang *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Kebijakan ini mewajibkan petani di seluruh Jawa, termasuk di Banyumas, untuk menanam tebu dan tanaman ekspor lainnya yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial (Aprilia et al., 2021, p. 45). Sistem yang lebih dikenal dengan sebutan Tanam Paksa ini bertumpu pada asas bahwa pemerintah kolonial memiliki hak untuk mengatur tenaga kerja serta 1/5 tanah milik masyarakat pribumi (Tichelaar, 1892, p. 18). Sistem ini bukan hanya bersifat eksploitatif, tetapi juga membawa pengaruh luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pribumi. Kebijakan tersebut pada akhirnya menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi kolonial mampu mengatur kehidupan rakyat hingga ke level paling mendasar, yakni penguasaan atas tanah dan tenaga kerja mereka.

Dalam pelaksanaan tanam paksa di Jawa Tengah, Banyumas menjadi salah satu wilayah yang berperan penting dalam menunjang produksi komoditas ekspor. Sebagai bagian dari karesidenan di Jawa Tengah, Banyumas juga berfungsi sebagai pusat pengolahan hasil pertanian

rakyat. Hasil panen tersebut wajib dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya, dan seluruh produksinya kemudian diserahkan kepada pihak pemerintah (Zulkarnain, 2015, p. 31). Selain itu, Pemerintah kolonial juga memperkenalkan sistem kerja baru melalui pendirian Pabrik Gula Kalibagor yang bergantung pada tenaga buruh, yang sebagian besar berasal dari kalangan petani. Para petani ini sebelumnya menjalani pola hidup agraris yang mandiri, namun kemudian menjadi bagian dari sistem kerja pabrik yang hierarkis dan dikendalikan oleh kebijakan kolonial. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari sistem sosial agraris ke sistem ekonomi kapitalistik kolonial yang bersifat eksploitatif dan terstruktur (Pamikat, 2019, p. 180). Dengan demikian, keberadaan Pabrik Gula Kalibagor tidak hanya mencerminkan kemajuan industri kolonial, tetapi juga memperlihatkan bagaimana modernisasi pada masa itu justru memperdalam ketimpangan sosial di tingkat lokal.

Melihat peran penting Pabrik Gula Kalibagor dalam pelaksanaan tanam paksa di Banyumas, penting untuk memahami bagaimana pabrik ini menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi untuk menghasilkan surplus bagi pemerintah kolonial (Kirana et al., 2024, p. 26). Meskipun kebijakan *Cultuurstelsel* atau tanam paksa telah banyak dibahas dalam kajian sejarah Indonesia, peran spesifik Pabrik Gula Kalibagor dalam pelaksanaan sistem ini di Banyumas pada abad ke-19 masih sangat terbatas dalam kajian-kajian yang ada. Banyak penelitian yang mengarah pada dampak ekonomi secara luas dari kebijakan tanam paksa, tetapi belum banyak yang secara mendalam mengungkapkan hubungan antara industri gula, kebijakan kolonial, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal, khususnya di wilayah Banyumas. Pabrik Gula Kalibagor yang mulai beroperasi pada tahun 1839 menjadi bagian penting dari sistem ini dan memainkan peran sebagai pusat produksi gula yang sangat menentukan dalam implementasi kebijakan tersebut (Salsabila, 2024, p. 3). Dengan dukungan dari pemerintah kolonial dan pengusaha asing, Pabrik Gula Kalibagor tidak hanya menjadi pusat ekonomi tetapi juga turut membentuk struktur sosial masyarakat setempat (Pamikat, 2019, p. 181). Karena itu, penelitian terhadap Pabrik Gula Kalibagor menjadi penting untuk memahami bagaimana kekuatan kolonial bekerja tidak hanya melalui kebijakan makro, tetapi juga lewat lembaga-lembaga ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung.

## METODE

Penelitian ini menerapkan metode sejarah yang terdiri atas lima tahapan, yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Topik difokuskan pada Pabrik Gula Kalibagor dalam kebijakan tanam paksa di Banyumas, mengingat pabrik ini merupakan yang pertama didirikan di wilayah tersebut pada tahun 1839 dan memiliki kontribusi penting dalam sistem agraria kolonial (Pamikat, 2019, p. 178). Tahap heuristik melibatkan pengumpulan sumber primer seperti arsip kolonial, dokumentasi visual, dan sumber sekunder berupa buku serta jurnal sejarah terkait kebijakan tanam paksa (Priyadi, 2021, pp. 25–26). Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan kolonial membentuk pola ekonomi serta kehidupan masyarakat Banyumas.

Tahap selanjutnya yaitu, Kritik sumber dilakukan melalui evaluasi eksternal dan internal untuk memastikan keabsahan dan objektivitas data (Yuan, 2022, p. 25). Pada tahap interpretasi, data dianalisis dalam kerangka ekonomi-politik kolonial guna mengungkap hubungan antara pabrik dan sistem tanam paksa di Banyumas (Kurniawan, 2014, p. 164). Hasil analisis disusun dalam tahap historiografi menjadi narasi ilmiah yang kronologis dan tematik, untuk merekonstruksi dinamika eksploitasi kolonial yang berlangsung anantara tahun 1839-1870 (Kuntowijoyo, 2013). Dengan demikian, data yang disajikan tidak hanya berupa fakta, tetapi juga menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Pabrik Gula Kalibagor sebagai bagian dari sistem ekonomi kolonial yang turut membentuk struktur sosial dan ekonomi masyarakat Banyumas pada masa itu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Tanam Paksa Di Banyumas

Penerapan cultuurstelsel atau sistem tanam paksa di Banyumas merupakan kebijakan percobaan yang dijalankan dengan lebih fleksibel oleh Johannes van den Bosch dibandingkan dengan sistem pajak tanah yang diperkenalkan Raffles, yang tidak berjalan secara efektif. Pergantian kebijakan sistem politik ini bertujuan untuk mendapatkan komoditas ekspor ke luar Negeri untuk mendapatkan keuntungan dan mendorong pemasukan uang kolonial belanda (Utama, 1983, p. 1). Kebijakan tanam paksa ini dinilai lebih efektif dibandingkan sistem pajak tanah yang diperkenalkan Raffles. Sistem tersebut juga merupakan strategi untuk meningkatkan pendapatan kolonial melalui pengembangan tanaman komoditas ekspor, menurut Sukardi, (2014, p. 61) menjelaskan bahwa Sistem tanam paksa mewajibkan desa-desa di Banyumas untuk mengalokasikan seperlima dari lahan mereka guna ditanami komoditas ekspor seperti kopi, nila, dan tebu yang kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial. Untuk mendukung produksi tebu di wilayah Banyumas tersebut, kemudian didirikan Pabrik Gula Kalibagor.

Dalam fase awal, area perkebunan yang disewa untuk mendukung oprasional pabrik mencakup sekitar 400 *bau*, meskipun hanya sebagian yang produktif (Nurwanti et al., 2015, p. 17). Lahan perkebunan untuk tanaman tebu tersebar di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas, dengan total sekitar 400 bau. Dari jumlah tersebut, antara 111 hingga 280 bau secara khusus digunakan untuk penanaman tebu, sementara sisanya merupakan lahan yang kurang produktif (Sukardi, 2014, p. 63) Keberandaan pabrik gula Kalibagor tidak hanya menjadi simbol perkembangan industri agrikultur kolonial, tetapi juga menjadi representasi dominasi kapitalisme kolonial terhadap sistem sosial ekonomi lokal.

Secara geografis, Kalibagor ditetapkan sebagai lokasi pendirian pabrik gula karena memiliki aksesibilitas yang strategis terhadap jalur transportasi utama, seperti Jalan Raya Pos dan Sungai Serayu, yang kemudian semakin diperkuat dengan pembangunan jaringan rel kereta api Serajoedal Stoomtram Maatschappij.



Gambar 1. Jalur Kereta Api Serajoedal Stoomtram Maatschappij. Sumber: Anri Banjoemas.

Kondisi ini menjadikan Pabrik Gula Kalibagor sebagai bagian penting dalam jaringan distribusi komoditas pertanian kolonial, khususnya tebu yang akan di jadikan gula. Dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan diatas sungai serayu untuk kepentingan kolonial (Sukardi, 2014, p. 94). infrastruktur tidak hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga simbol kontrol kolonial terhadap wilayah Banyumas. Dengan tersambungny jalur transportasi antara perkebunan tebu, pabrik gula, dan pelabuhan, roda ekonomi kolonial dapat berputar lebih efisien serta mengintegrasikan Banyumas ke dalam sistem ekonomi global yang berorientasi pada ekspor hasil perkebunan, terutama gula. Sejalan dengan itu, menurut (Wahyuni et al., 2016, pp. 134–135) adanya infrastruktur yang memadai untuk membantu distribusi ekspor dapat dilakukan secara cepat yang mampu meningkatkan ekspor, sehingga pemerintah kolonial Banyumas menyumbang ekspor gula secara masif di Hindia Belanda. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksudkan untuk memperkuat perekonomian lokal, tetapi juga menjadi

strategi kolonial dalam memperkokoh dominasi ekonomi dan politik Belanda atas masyarakat pribumi.

Seiring dengan berkembangnya infrastruktur dan peningkatan produksi gula tersebut, dampak sosial dan ekonomi mulai dirasakan oleh masyarakat lokal. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa penerapan sistem tanam paksa di Banyumas tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi komoditas ekspor, tetapi juga menjadi bagian dari strategi kolonial Belanda dalam memperkuat kendali ekonomi masyarakat sekitar. Melalui kebijakan ini, masyarakat Banyumas mempunyai tantangan untuk menyesuaikan pola hidup dan mata pencaharian mereka dengan kebutuhan industri kolonial, terutama setelah berdirinya pabrik gula Kalibagor yang menjadi pusat pengolahan tebu di wilayah Banyumas.

### Perubahan Menuju Industrialisasi

Perubahan dari sistem tanam paksa ke tahap industrialisasi di Jawa, khususnya di Banyumas, merupakan bagian dari transformasi kebijakan kolonial Belanda pada pertengahan abad ke-19. Setelah diberlakukannya *cultuurstelsel* yang dimulai pada tahun 1830, pemerintah kolonial memperoleh keuntungan besar dari komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila (Basundoro, 2013, p. 464). Namun, sistem ini menuai kritik, baik dari kalangan liberal di Belanda maupun kaum humanis yang menilai tanam paksa menyebabkan penderitaan rakyat. Kritik tersebut kemudian melatarbelakangi lahirnya kebijakan ekonomi liberal yang memberikan kesempatan lebih luas kepada pihak swasta untuk mengelola sektor perkebunan dan industri di Hindia Belanda (Furnivall, 1939, p. 112). Perubahan ini menjadi titik awal bergesernya sistem ekonomi kolonial dari eksploitatif menuju kapitalistik industri yang lebih teroganisir.

Perubahan kebijakan kolonial ini kemudian berpengaruh di Banyumas, perubahan menuju industrialisasi terlihat pada berkembangnya usaha perkebunan tebu yang dikelola dengan pola kapitalisme modern. Jika pada masa tanam paksa petani diwajibkan menanam tebu untuk diserahkan ke pemerintah, maka pada era industrialisasi tanah-tanah rakyat disewa oleh perusahaan swasta untuk dijadikan areal tebu (Furnivall, 1939, p. 211). Perusahaan juga mendirikan pabrik-pabrik gula guna mengolah hasil tebu secara menyeluruh. Salah satu wujud nyata dari transformasi ini adalah berdirinya Pabrik Gula Kalibagor pada tahun 1839, yang menandai pergeseran orientasi ekonomi dari sekadar eksploitasi kerja paksa menuju industrialisasi berbasis teknologi modern (Kartodirdjo, 1991, p. 73). Dengan berdirinya pabrik ini, Banyumas mulai memasuki babak baru dalam sejarah ekonomi kolonial yang ditandai oleh munculnya sektor industri sebagai penggerak utama pembangunan wilayah.

Pabrik gula tidak semata-mata berperan sebagai pusat produksi, tetapi juga merepresentasikan simbol modernisasi kolonial di wilayah Banyumas. Pabrik gula Kalibagor menjadi pelopor dalam penerapan teknologi mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia di Wilayah Karesidenan Banyumas (Salsabila, 2024, p. 3). Penerapan mesin uap di pabrik ini menandai pergeseran penting dari sistem produksi tradisional menuju sistem industri modern di Jawa pada masa kolonial. Transisi ini sekaligus mengubah pola sosial masyarakat Banyumas, di mana sebagian petani beralih menjadi buruh pabrik, sementara elite lokal mendapatkan keuntungan melalui kerja sama dengan pengusaha Belanda dengan berbagai pembangunan infrastruktur, seperti jalur rel kereta api. Dengan demikian, perubahan menuju industrialisasi tidak hanya mengubah struktur ekonomi, tetapi juga memengaruhi relasi sosial di tingkat lokal (Salsabila, 2024, p. 4).

Perkembangan perubahan ekonomi di Banyumas tersebut memperlihatkan bahwa proses industrialisasi tidak muncul secara seketika, melainkan merupakan hasil dari rangkaian proses panjang yang berawal dari penerapan sistem tanam paksa. Kehadiran pabrik gula Kalibagor menjadi titik balik yang memperlihatkan bagaimana kebijakan kolonial, teknologi, dan relasi sosial yang membentuk tatanan ekonomi baru bagi masyarakat Banyumas. Di balik kemajuan industri dan pembangunan infrastruktur, terdapat juga perubahan nasib masyarakat sekitar yang menjadi buruh pabrik gula Kalibagor (Sukardi, 2014, p. 140). Meskipun pembangunan pabrik dan infrastruktur pendukung seperti jalur transportasi membawa dampak modernisasi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga menunjukkan adanya praktik eksploitasi terhadap tenaga kerja serta sumber daya

lokal. Oleh karena itu, sistem tanam paksa dan berdirinya Pabrik Gula Kalibagor menjadi bukti nyata bahwa modernisasi kolonial tidak sepenuhnya membawa kemajuan, melainkan juga menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Banyumas.

### Dampak Sosial Ekonomi

Kehadiran Pabrik Gula Kalibagor menimbulkan perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Banyumas pada abad ke-19. Pada awal berdirinya, pabrik ini menjadi pusat aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja dari kalangan petani lokal. Pergeseran mata pencaharian dari petani menjadi buruh pabrik menunjukkan transisi sosial menuju sistem ekonomi kolonial yang berorientasi pada industri (Pamikat, 2019, p. 187). Kondisi ini memperlihatkan masyarakat agraris yang berubah pola sosial menuju sistem kerja upah yang diatur oleh kolonial. Oleh karena itu, Pabrik gula kalibagor menjadi simbol awal modernisasi ekonomi kolonial yang mengubah pola hidup dan tatanan sosial masyarakat Banyumas. Perubahan ini menandai titik awal keterikatan masyarakat terhadap sistem ekonomi baru yang mengandalkan tenaga kerja dan produksi berbasis industri.

Perubahan sistem ekonomi ini juga berdampak pada pola ketergantungan masyarakat terhadap sumber penghasilan baru. Secara ekonomi, masyarakat Banyumas tidak hanya bertumpu pada sektor perkebunan, tetapi juga mulai bergantung pada sektor transportasi dan industri kerajinan. Namun ketergantungan upah pada Pabrik Gula Kalibagor menciptakan kerentanan sosial, yang dimana penurunan angka pekerja ketika masuknya mesin uap yang menggantikan tenaga manusia (Salsabila, 2024, p. 3), serta dampak ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar ketika produksi gula menurun akibat fluktuasi harga dan menipisnya bahan baku tebu (Prihandana, 2005, p. 57).

Kondisi sosial ini menunjukkan bahwa modernisasi industri tidak selalu membawa kesejahteraan merata, melainkan dapat memperdalam kesenjangan sosial antara buruh pabrik dan kelompok elite lokal yang menikmati keuntungan lebih dari sistem kolonial ini. Situasi ini memperlihatkan bahwa modernisasi industri tidak selalu menghadirkan kesejahteraan merata, melainkan sering memperdalam kesenjangan sosial antara buruh pabrik dan kelompok yang menikmati keuntungan sistem kolonial. Dengan demikian, dinamika ekonomi kolonial di Banyumas menjadi cermin ketimpangan sosial akibat sistem produksi yang menempatkan buruh sebagai pihak yang paling rentan terhadap perubahan.

Dampak ekonomi tersebut kemudian berpengaruh langsung pada kehidupan sosial masyarakat. Dari sisi sosial, masyarakat Banyumas pada saat itu mengalami perubahan sosial sehingga muncul kesenjangan antara elite lokal yang bekerja sama dengan pengusaha Belanda dan kelompok buruh yang hanya menjadi pekerja rendahan (Lorentius, 2017, p. 54). Para buruh pabrik direkrut dari penduduk sekitar, khususnya dari desa disekitar Kalibagor (Sukardi, 2014, p. 121). Mereka terdiri atas kelompok masyarakat yang tidak memiliki lahan luas. Selain itu, para petani juga berupaya memperoleh pendapatan tambahan guna memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti pembayaran pajak dan pelunasan utang (Levert, 1934, p. 188). Menurut Sukardi, (2014, p. 122)

Kelas elite lokal, seperti lurah dan bangsawan priyayi, umumnya mendapat posisi strategis sebagai pengawas tenaga kerja atau perantara antara pihak perusahaan dengan masyarakat desa, sehingga memperkuat posisi sosial mereka di bawah struktur kekuasaan kolonial. keberadaan pabrik gula Kalibagor tidak hanya mengubah sistem ekonomi, tetapi juga memperkuat stratifikasi sosial yang membentuk struktur masyarakat kolonial Banyumas. Hal ini menegaskan bahwa industrialisasi kolonial membawa dampak sosial yang kompleks, di satu sisi kondisi tersebut membuka peluang kerja baru, tetapi di sisi lain memperjelas kesenjangan kelas sosial serta memperkuat ketergantungan terhadap sistem kolonial.

### PENUTUP

Penerapan sistem tanam paksa di Banyumas pada abad ke-19 menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi kolonial Belanda membentuk struktur sosial dan ekonomi masyarakat lokal secara mendalam. Melalui pendirian pabrik gula Kalibagor pada tahun 1839, pemerintah kolonial berhasil menjadikan wilayah ini sebagai pusat pengolahan tebu yang berperan penting dalam mendukung sistem *Cultuurstelsel*. Keberadaan pabrik tersebut memperlihatkan pembaruan antara kebijakan agraria kolonial dengan perkembangan teknologi industri awal di Jawa. Selain sebagai pusat produksi gula, pabrik ini menjadi alat kontrol ekonomi dan sosial yang memperkuat dominasi kolonial atas masyarakat pribumi. Perubahan dari sistem pertanian menuju produksi komoditas ekspor menandai awal pergeseran menuju ekonomi kapitalistik di wilayah Banyumas. Dengan kata lain, Pabrik Gula Kalibagor tidak hanya menjadi simbol modernisasi kolonial, tetapi juga menunjukkan bagaimana kolonialisme beroperasi secara sistematis untuk menguasai sektor agraria dan mengubah dinamika sosial masyarakat lokal.

Perubahan sistem tanam paksa menuju fase industrialisasi kemudian menjadi babak baru dalam sejarah ekonomi Banyumas. Pabrik Gula Kalibagor yang semula berfungsi sebagai pelaksana kebijakan *cultuurstelsel* lambat laun berkembang menjadi simbol modernisasi industri kolonial. Melalui penerapan teknologi mesin uap dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalur kereta api *Serajoedal Stoomtram Maatschappij* yang menghubungkan Kalibagor dengan wilayah lain di Banyumas, sistem distribusi hasil tebu dan gula menjadi semakin efisien. Jalur kereta api tersebut tidak hanya mempercepat pengangkutan hasil produksi, tetapi juga memperluas jaringan ekonomi kolonial di Jawa.

Dampak industrialisasi dan pembangunan infrastruktur tersebut tidak berhenti pada aspek ekonomi semata, melainkan turut mengubah tatanan sosial masyarakat Banyumas. Ketergantungan terhadap sistem kerja upahan di Pabrik Gula Kalibagor dan keterikatan pada jaringan transportasi kolonial menciptakan struktur sosial baru yang menempatkan buruh pada posisi paling rentan, sementara elite lokal yang bekerja sama dengan pengusaha Belanda menikmati keuntungan besar dari sistem kolonial. Akibatnya, muncul kesenjangan sosial yang semakin nyata antara kelompok pekerja dan penguasa lokal. Kondisi ini menegaskan bahwa modernisasi kolonial tidak sepenuhnya membawa kemajuan yang merata, melainkan memperlihatkan pertentangan antara pembangunan dan penindasan. Oleh karena itu, kajian ini terhadap Tanam Paksa hingga munculnya Pabrik Gula Kalibagor menjadi penting untuk memahami bagaimana modernisasi kolonial di Banyumas membentuk struktur ekonomi baru sekaligus meninggalkan warisan sosial berupa ketimpangan yang terus terasa hingga masa sesudahnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, A. T., Irawan, H., & Budi, Y. (2021). Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2). <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.465>
- Basundoro, P. (2013). Sisi Terang Kolonialisme Belanda di Banyumas. In *Membedah Sejarah dan Budaya Maritim Merajut Keindonesiaan*.
- Furnivall, J. S. (1939). *netherland india: A study of plural economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kartodirdjo, S. (1991). *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*. Aditya Media.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kurniawan, H. (2014). Sistem Tanam Paksa dan Perubahan Sosial Ekonomi di Jawa Tengah Abad ke-19. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 164.
- Levert, P. (1934). *Inheemsch Arbeid In De Java Suikerindustrie*. Wageningen Veenman.
- Lorentius, G. (2017). Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2(2). <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40>

- Nurwanti, Y. H., Harnoko, D., & Larasati, T. A. (2015). Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942.
- Pamikat, R. (2019). Pabrik Gula Kalibagor: Perkembangan dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Tahun 1957-1997. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1).
- Kirana, D. P., Aulia, N. P., & Pradana, T. G. A. (2024). Teori Pemikiran Ekonomi Klasik “Invisible Hand” dan Relevansinya pada APBN di Indonesia. *JEB17 : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(02). <https://doi.org/10.30996/jeb17.v9i02.6791>
- Prihandana, R. (2005). *Dari pabrik gula menuju industri berbasis tebu*. Proklamasi Publishing House.
- Priyadi, S. (2021). *Metode Penelitian Sejarah*. Pustaka Pelajar.
- Salsabila, V. G. (2024). *Modernisasi Kota Purwokerto tahun 1930-1942*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sukardi, T. (2014). *Tanam Paksa di Banyumas : Kajian Mengenai Sistem, Pelaksanaan, dan Dampak Sosial Ekonomi*. Pustaka Pelajar.
- Tichelaar, J. J. (1892). *De Java Suikerindustrie en Here Betekenis Voor Land en Volk*. Soerbaja: Syndicaat Van Suikerfarikaten in Nederlandsch.
- Utama, S. H. (1983). *Kegagalan Tanam Paksa Suatu Tinjauan Singkat Secara Struktural-Birokratis*.
- Wahyuni, S., Supriyati, N., & Sinuraya, J. F. (2016). Industri dan Perdagangan Gula di Indonesia: Pembelajaran dari Kebijakan Zaman Penjajahan – Sekarang. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 27(2). <https://doi.org/10.21082/fae.v27n2.2009.133-149>
- Yuan, M. L. (2022). Perkebunan Kopi dan Sistem Tanam Paksa di Karesidenan Banyumas. *Istoria UNY*, 6(1).
- Zulkarnain, Z. (2015). Serba-Serbi Tanam Paksa. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 8(1). <https://doi.org/10.21831/istoria.v8i1.3720>